

**(PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Pembangunan Gedung Serbaguna dan Sumur Bor Dalam
Program Percepatan Pembangunan Infratsruktur Desa / Kelurahan Mandiri
Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan
Tahun 2013)**

Oleh

Tri Ananda Putri

haaputtesa@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Background problems implementing the Infrastructure Development Acceleration Program / District Village Self In Sekijang Village District of Bandar Sei Kijang Pelalawan in 2013 was less than optimal implementation of the program in terms of public participation. With the approach of the implementation of the program of community empowerment means the entire process of implementation of activities (preparation, planning, implementation and post-implementation physical physically) active community participation listed on Pelalawan decree No. 63 of 2013.

The research goal is to examine how community participation in every phase of activity in the Infrastructure Development Acceleration Program / District Village Self In Sekijang Village District of Bandar Sei Kijang Pelalawan in 2013.

The study was conducted with a qualitative approach with descriptive type. Informants selected as samples, while the data collected by teknin interviews, observation and research documents as a source of research data.

Based on the results of research through interviews, observation and document penuluruhan. it can be seen that the lack of public participation in the implementation of the Program for the Acceleration of Infrastructure Development / District Village Self In Sekijang village district of Bandar Sei Kijang Pelalawan in 2013.

Keywords: Community Participation, Rural Development / Village

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dan kekhasan daerah masing-masing. Pengertian Otonomi daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semenjak adanya Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah kemudian banyaknya daerah-daerah otonom yakni daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan berdiri pula program-program pemerintahan daerah yang guna membangun kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan pada 27 Desember 2013 mengeluarkan program berbasis partisipasi masyarakat yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014. Program ini adalah program yang memberikan kepercayaan dan melibatkan masyarakat Desa/Kelurahan secara aktif dalam merencanakan dari tahap

awal, melaksanakan, mengawasi, hingga tahap akhir yakni memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang bersifat sederhana. Partisipasi yang dibutuhkan adalah berupa saran ide gagasan serta tenaga untuk pembangunan infrastruktur nantinya. dan dapat dikerjakan dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana serta sesuai kebutuhan yang paling mendesak di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Program juga ini dapat dipercaya meminimalisir biaya karena apabila pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pemborong/kontraktor maka biaya yang dikeluarkan tentulah besar.

Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan Desa/Kelurahan sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Lokasi pelaksanaan Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini adalah di setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 106 desa dan 12 Kelurahan.

Dana untuk program PPIDK Mandiri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan dengan total dana Rp.

50.7 miliar. Dana bantuan khusus untuk PPIDK ini kemudian diteruskan ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa/Kelurahan untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemangkasan dana anggaran. Jumlah dana bantuan khusus ini untuk tiap Desa/Kelurahan yang berada diperairan ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan untuk Desa/Kelurahan yang berada di daratan Rp. 400.000.000,-. Maksud pelaksanaan Program PPIDK Mandiri ini adalah mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 tujuannya adalah:

1. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa/Kelurahan untuk:
 - a. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah.
 - b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan

pendapatan masyarakat di Desa/Kelurahan.

- c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat.
- d. Mempercepat dan menyebarkan pembangunan di setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Program PPIDK Mandiri

Tahun 2013 sasaran program ini adalah:

1. Sasaran utama adalah masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan.
2. Tersedianya infrastruktur Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kemampuan berorganisasi masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur Desa/Kelurahan serta menimbulkan kesadaran untuk selalu memelihara infrastruktur yang ada.

5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan yang dapat diterima oleh masyarakat, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Adapun Prinsip dan pendekatan program PPIDK Mandiri tahun 2013 ini sendiri adalah:

1. Acceptable (dapat diterima) pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.
2. Transparant (terbuka) penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat.
3. Accountable (tanggung jawab) penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ketetapan sasaran, waktu, pembiayaan an mutu pekerjaan.
4. Sustainable (berkelanjutan) penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini terdapat 11 ruang lingkup pembangunan yang

boleh dibangun oleh masyarakat Desa/Kelurahan yakni:

- Jalan lingkungan Desa/Kelurahan
- Jalan usaha tani
- Jembatan sederhana
- Titian plat beton
- Tambatan perahu / Dermaga sederhana
- Box culvert
- Gorong-gorong
- Sarana Air bersih
- Listrik Desa/Kelurahan
- Drainase, Bangunan gedung sederhana.

Adapun tahap kegiatan Program PPIDK Mandiri tingkat Desa/Kelurahan yaitu:

1. Tahap Persiapan
Adapun tahap persiapan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti:
 - a. Sosialisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
 - b. Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan I.
2. Tahap Perencanaan
Adapun tahap perencanaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti:
 - a. Survey kampung sendiri.
 - b. Musyawarah Desa/Kelurahan II.
3. Tahap Pelaksanaan Fisik
Adapun tahap pelaksanaan fisik yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti:
 - a. Musyawarah Desa/Kelurahan III.
 - b. Pelaksanaan Program Infrastruktur.

4. Tahap Paska Pelaksanaan Fisik
Adapun tahap pelaksanaan fisik yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti:

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan IV.
- b. Pemeliharaan Infratsruktur.

Dalam rangkaian tahapan kegiatan diatas ada beberapa jenis kegiatan yang mempunyai ketentuan syarat hadirnya peserta musyawarah seperti sosoalisasi tingkat desa/kelurahan, musyawarah desa/kelurahan I, musyawarah desa kelurahan II, musyawarah desa/kelurahan III serta musyawarah desa/kelurahan IV yang bisa dilihat

pada pedoman umum dan pedoman pelaksanaan Program PPIDK Mandiri Tahun 2013, dengan menghadirkan peserta rapat yakni:

- Masyarakat Desa, termasuk kaum miskin dan kaum perempuan.
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok/organisasi masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.
- Aparat Desa/Kelurahan, Badan Perwakilan Desa (BPD), Pendamping Kecamatan sebagai narasumber

Tabel 1.1 : Daftar Hadir Peserta Sosialisasi/Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan Program PPIDK Mandiri Tahun di Kelurahan Sekijang Tahun 2013.

NO	PESERTA YANG WAJIB DIUNDANG	DAFTAR HADIR SOSIALISASI TAHUN 2013 (dalam orang)				
		Sosialisasi	Musyawarah			
			I	II	III	IV
1	Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
2	Kaum Miskin/Perempuan	-	-	-	-	-
3	Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-
4	Tokoh Agama	-	-	-	-	-
5	Tokoh Adat	-	-	-	-	-
6	Tokoh Pemuda	1	1	2	2	2
7	Organisasi Masyarakat	10	10	12	7	8
8	Aparat Desa/Kelurahan	20	18	20	12	17
9	Aparat Kecamatan	1	1	1	1	1

Sumber : Data Olahan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi dan Musyawarah Kelurahan Sekijang PPIDK Mandiri Tahun 2013.

Dari Data Olahan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi dan Musyawarah Kelurahan Sekijang

PPIDK Mandiri Tahun 2013 dilihat bahwa pada pelaksanaan Sosialisasi, Musyawarah I sampai IV di Tahun

2013 khususnya masyarakat tidak ada yang hadir. Terlihat dari grafik diatas , pada garis yg berwarna biru adalah sosialisasi pertama tingkat kelurahan Program PPIDK Mandiri tahun 2013 dimana yang hadir hanya Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat, Aparat Kelurahan dan Aparat Kecamatan dan tidak terlihatnya masyarakat yang hadir pada saat itu.

Singkat jelas bahwa mengapa program ini membutuhkan partisipasi masyarakat mulai tahap awal hingga akhir karena pemerintah ingin menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan itu sendiri. Tidak hadirnya masyarakat yang bisa dilihat dari daftar hadir peserta sosialisasi dalam pelaksanaan Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan , membuat penulis ingin meneliti kenapa tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi sedangkan masyarakat adalah sasaran utama program ini mulai dari tahap awal hingga akhir yakni partisipasi berupa saran, ide, gagasan maupun tenaga masyarakat.

KERANGKA TEORI

Cohen dan Uphoff (1990:104) mengatakan bahwa ada beberapa tahapan partisipasi dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi terdiri dari:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.

2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, (2) Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi, (3) Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil menangani sasaran.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Mikkelsen (1996:64) membagi partisipasi menjadi 5 (lima) pengertian:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari

- masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
 3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
 4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebaannya untuk melakukan hal itu.
 5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

Mubyarto (1984) menyatakan bahwa partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Koentjaraningrat (2000), bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas pembangunan melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Persiapan

Untuk melakukan suatu pembangunan tahap persiapan sangatlah penting untuk dilakukan apalagi program ini baru pada Tahun 2013 masyarakat di Kelurahan Sekijang perlu mengenal bagaimana tentang Program PPIDK Mandiri ini.

Pada tahap persiapan di Kelurahan Sekijang Tahun 2013 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Lurah dan didampingi oleh Pendamping Kelurahan dan Tim Pengendali dari Kecamatan yaitu :

1. Sosialisasi tingkat kelurahan

Sosialisai tingkat kelurahan dalam upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Program PPIDK Mandiri dengan mengundang masyarakat secara luas, unsur pemerintah kelurahan, BPD, lembaga / organisasi masyarakat ditingkat kelurahan.

2. Musyawarah kelurahan I

Musyawah desa / kelurahan I merupakan forum pertemuan masyarakat dilaksanakan oleh Lurah untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)

dengan mengundang elemen masyarakat yang sama dengan sosialisasi awal yakni masyarakat secara umum, termasuk diutamakan kaum miskin dan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok dan lembaga organisasi masyarakat, aparat lurah, tim pengendali kecamatan dan pendamping kecamatan sebagai nara sumber.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Dalam menentukan penetapan rencana pembangunan sampai pengambilan keputusan dilakukanlah musyawarah desa dengan tujuan agar rencana pembangunan dan tahap pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, yang dianggap bisa bermanfaat dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan yang dilakukan jika mereka merasa dilibatkan dalam segala prosesnya.

Dalam perencanaan termasuk dalam pengambilan keputusan jenis Infrastruktur apa yang akan dibangun di Kelurahan Sekijang ini dan juga sesuai dengan infrastruktur apa yang boleh dibangun dalam Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini. partisipasi dan musyawarah masyarakat sangat dibutuhkan dengan melakukan tahap awal dalam perencanaan yakni:

1. Survey kampung sendiri

Survey kampung sendiri dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi kondisi kelurahan, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dan prasarana, sampai

dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk penyusunan proposal kegiatan masyarakat. Survey kampung sendiri ini dilakukan oleh KSM bersama pendamping kelurahan serta relawan masyarakat dari masing-masing dusun / RW.

2. Musyawarah kelurahan II

Selanjutnya Musyawarah Desa / Kelurahan II dilaksanakan oleh Lurah dan disiapkan oleh KSM dengan dukungan pendamping kelurahan. Musyawarah desa / kelurahan II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka diharapkan mampu merumuskan prioritas permasalahan dan rencana kegiatan. Juga menentukan jenis infrastruktur apa yang akan dibangun sesuai dengan ruang lingkup Program PPIDK Mandiri Tahun 2013.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dikarenakan tidak adanya himbauan ataupun undangan kepada masyarakat secara umum. Tingkat kehadiran masyarakat tidak terlalu dibutuhkan dalam Program PPIDK Mandiri ini karena ada beberapa pihak-pihak terkait yang ingin membangun gedung serbaguna tersebut demi kepentingan dan kegunaan sebahagian pihak saja bukan untuk kepentingan dan kegunaan masyarakat umum dan kebutuhan mendesak.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Fisik

Pembangunan yang dilakukan merupakan suatu proses perkembangan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Selain dari partisipasi kritik dan saran

yang diharapkan dari masyarakat dalam Program PPIDK Mandiri ini juga dibutuhkannya partisipasi berupa tenaga. Dimana bisa kita lihat dari tujuan program ini yakni salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin didesa / kelurahan. Bagaimana dijelaskan dari salah satu tujuan program ini tenaga yang dibutuhkan dalam pembangunan

1. Musyawarah kelurahan III

Sebelum pelaksanaan fisik dimulai dilaksanakanlah musyawarah desa/kelurahan III di Kelurahan Sekijang. Pada musyawarah desa/kelurahan III ini merupakan forum pertemuan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengaturan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, calon tenaga kerja dan besaran upah), pengaturan bahan (jenis bahan, jumlah bahan, asal bahan), pengaturan alat (jenis alat, jumlah alat, asal alat), dan pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan.
- b. Menetapkan mekanisme dan rencana pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dari data olahan daftar hadir musyawarah kelurahan III di Kelurahan Sekijang diatas dapat disimpulkan kembali bahwa sama dengan musyawarah sebelumnya kurangnya partisipasi masyarakat. Yang hadir pada musyawarah ini

adalah orang-orang yang sama pada musyawarah sebelumnya yakni tokoh pemuda 2 orang, organisasi kelurahan 7 orang, aparat kelurahan 12 orang dan aparat kecamatan 1 orang. Jika dilihat dari segi jumlah orang yang hadir sangat menurun dari musyawarah sebelumnya.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Pada pelaksanaannya pembangunan sumur bor dan gedung serbaguna dilakukan secara bersama dengan membagi beberapa tim kerja agar terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien di Kelurahan Sekijang. Pembangunan gedung serbaguna akan dibangun tepat disamping Kantor Lurah Sekijang dengan ukuran 12 x 22 m dan Sumur Bor dibangun di 6 titik lokasi yang berbeda.

adanya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur gedung serbaguna. beberapa dari mereka ada yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Partisipasi disini adalah partisipasi berupa tenaga yang nantinya akan diberikan upah. Namun dilihat dari hasil wawancara responden kedua, mereka (ahli tukang) tersebut awalnya sebenarnya tidak tahu- menahu soal program ini, masyarakat (ahli tukang) hanya disuruh bekerja untuk membangun gedung serbaguna dan sumur bor tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tenaga dinyatakan baik. Dan juga dapat memajukan roda perekonomiannya bagi masyarakat yang sedang tidak mempunyai

pekerjaan. Mereka turut serta dalam pembangunan fisik kelurahan.

bisa ditarik kesimpulan bahwa kurang optimalnya penyelenggaraan Program PPIDK Tahun 2013 dan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan tidak adanya himbuan ataupun undangan yang ditujukan kepada masyarakat umum meskipun sebenarnya program ini ditujukan sasarannya kepada masyarakat didesa/kelurahan itu sendiri.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Paska Pelaksanaan Fisik

Tahap Kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Paska Pelaksanaan Fisik adalah:

1. Musyawarah Kelurahan IV

Musyawarah Kelurahan IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai atau pada batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musyawarah ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan fisik dan serah terima hasil kegiatan infrastuktur yang telah dibangun di Kelurahan Sekijang Tahun 2013 yaitu Gedung Serbaguna dan 6 Unit Sumur Bor.

2. Pemeliharaan Hasil

Tahap paska pelaksanaan fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan serta memelihara infrastruktur yang sudah dibangun secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur kelurahan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pemeliharaan

hasil-hasil pembangunan sangatlah penting karena bisa membuat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan bisa bertahan dengan lama dan berkelanjutan. Serta dalam segi pemanfaatan infrastuktur apakah masyarakat memanfaatkan infrastuktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya berguna untuk masyarakat dikelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan juga sangat dibutuhkan, masyarakat diharapkan dapat membersihkan dan menjaga hasil pembangunan agar hasil dari pembangunan itu bisa bertahan lama dan selalu dalam kondisi baik untuk digunakan.

Dari program pembangunan yang telah dilakukan. Kesuksesan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat turut serta memanfaatkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhannya dan pembangunan yang telah dilakukan apakah mampu bertahan dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun melalui Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini. Belum sepenuhnya bermanfaat bagi warga masyarakat di Kelurahan Sekijang khususnya dalam pembangunan gedung serbaguna. Akan tetapi dalam segi pemanfaatan pembangunan sumur borlah yang mendapatkan respon positif bagi warga masyarakat di Kelurahan Sekijang.

KESIMPULAN

Dari data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dan membawa kemajuan yang ada di Kelurahan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mulai dari tahap sosialisasi, tahap perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap hasil.

Terdapat 4 sub indikator bentuk partisipasi masyarakat dalam Program PPIDK Mandiri Tahun 2013 di Kelurahan Sekijang yaitu partisipasi masyarakat dalam sosialisasi bisa dikatakan rendah, partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergolong rendah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk rendah juga. Dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan serta pemeliharaan juga dapat dikatakan kurangbaik / rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kepentingan sepihak dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa / Kelurahan (PPIDK) Mandiri Tahun 2013 di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Sehingga terciptanya pembangunan yang menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Serta bisa dilihat dari segi pemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- _____. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastuktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri Tahun 2013*. Pelalawan
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Hanafi J. 1991. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Infrastruktur Dan elayanan Perkotaan Dalam Analisis Sistem*. Edisi Khusus. Jakarta: BPPT
- Sutrisno. Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Hidayat Wisnu. 2004. *Pembangunan partisipasi*. YPAI. Yogyakarta
- Baratakusuma. 2005. *Perencanaan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pusaka Utama. Jakarta

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Slamet Margono. 1995. *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*. LPM Universitas Brawijaya. Malang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Camat Bandar Sei Kijang Nomor 400/Ekbang-PPIDK/016 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Organisasi Kelompok SWADAYA Masyarakat (KSM) Kelurahan Sekijang Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK)

Mandiri Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2013.

Skripsi dan Sumber Lainnya

Rivo Eko Nugraha. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Ketua `Rukun Warga (RW) Secara Langsung di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

Al Ikhlas. 2014. Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Sahdila Rahayu. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Ave Bizatama. 2012. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

www.riauterkini.com

